




**PEMERINTAH KOTA TANGEBRANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM**

Nomor SOP	69/000 B 1 3 / III / 2015
Tanggal Perbuatan	8 Maret 2015
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Ditandatangani oleh	
Nama SOP	Prosedur Pelaksanaan Register Produk Hukum Daerah

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1 Memahami peraturan perundang-undangan mengenai legal drafting produk hukum daerah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	2 Memahami administrasi produk hukum daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum	3 Memahami tugas pokok dan fungsinya
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	4 Dapat bekerjasama dalam Tim
5. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
6. Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum	
7. Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Melakukan Register Produk Hukum Daerah	1 Komputer/scanner/printer 2 Jaringan Internet 3 Alat Dan Jaringan Komunikasi 4 Alat Tulis Kantor 5 Ruang rapat beserta kelengkapannya

No	Uraian kegiatan	Pelaksana											Mata Belah			Materi	
		Perangkat Daerah Pemrakarsa	Administrasi Pekaantoran	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan	Tim Propemperda	Tim Pembahasan Raperda	Kepala Bagian Hukum	Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Banten	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah	Wakil Wakil Kota	Wakil Kota	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyampaikan Rancangan Perda Kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Cq Kepala Bagian Hukum													Rancangan Perda, Hasil Akademi/Keuangan/Perencanaan Umum Surat Keputusan	1 Meas	Tanda Terima	
2	Melakukan Registrasi Usulan Rancangan Perda													Tanda Terima	5 Meas	Buat Keputusan	
3	Mendisposisikan Surat ke Ketua Tim Kerja Perundang-undangan													Buat Registrasi	5 Meas	Dapmas	
4	Membuat undangan rapat Pembahasan bersama Tim Propemperda													Dapmas	1 hari	Undangan	
5	Melakukan expose Rancangan Perda di Hadapan Tim Propemperda													Undangan	1 hari	Rancangan Perda, Hasil Akademi/Keuangan/Perencanaan	
6	Memberikan keputusan apakah menyetujui atau tidak Rancangan Perda yang bersangkutan untuk dibahas tahun berikutnya													Rancangan Perda, Hasil Akademi/Keuangan/Perencanaan	1 hari	Rancangan Perda, Hasil Akademi/Keuangan/Perencanaan dan penyetujuan Tim Propemperda	
7	Melakukan koreksi awal terhadap Rancangan Perda													Rancangan Perda, Hasil Akademi/Keuangan/Perencanaan dan persetujuan Tim Propemperda	1 Hari	Berikut hasil terhadap Rancangan Perda	
8	Memfasilitasi pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Perda													Korrek awal terhadap Rancangan Perda	1 Hari	Dapmas hasil dari meeting Tim Pembahasan Rancangan Perda	

9	Membahas Rancangan Perda													Rancangan Perda Edisi Kedua yang Telah Diperbaiki dan Ditandatangani Gubernur	10/07	Rancangan Perda: Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
10	Rancangan Perda yang telah dibahas diakumulasi dan ditandatangani di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten						01/08							Rancangan Perda: Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	10/07	Rancangan Perda: Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
11	Mengajukan Nota Dinas Perundang-undangan Surat Permohonan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Hasil Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten													Rancangan Perda: Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	10/07	Rancangan Perda: Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
12	Memeriksa Nota Dinas Perundang-undangan Surat Permohonan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Hasil Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten						01/08							Rancangan Perda: Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	10/07	Rancangan Perda: Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
13	Memeriksa Nota Dinas Perundang-undangan Surat Permohonan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Hasil Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten								01/08					Rancangan Perda: Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	10/07	Rancangan Perda: Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
14	Memeriksa Nota Dinas Perundang-undangan Surat Permohonan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Hasil Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten								01/08					Rancangan Perda: Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	10/07	Rancangan Perda: Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

15	Menyediakan Nota Dinas Perundang-undangan Surat Persebahan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Hasil Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten											6da	wda	Rancangan Perda Daerah rancangan Surat Persebahan Penyampaian Rancangan Perda	1 Hari	Rancangan Perda Daerah rancangan Surat Persebahan Penyampaian Rancangan Perda	
16	Menandatangani Surat Persebahan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Hasil Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten											6da	wda	Rancangan Perda Daerah rancangan Surat Persebahan Penyampaian Rancangan Perda	1 Hari	Rancangan Perda Daerah rancangan Surat Persebahan Penyampaian Rancangan Perda	
17	Menyampaikan Rancangan Perda Hasil Harmonisasi Kantor Wilayah Hukum Banten ke DPRD Kota Tangerang		6da											Rancangan Perda Daerah rancangan Surat Persebahan Penyampaian Rancangan Perda	01 menit	Denda Denda	
Jumlah Total Waktu														10 Hari 211 Menit			